

Analisis Kebijakan Pendidikan: A Sytematic Literature Review

Melati Agustini¹, Fatia Salsabila², Miswatul Khaira³, Zulkhairi⁴

^{1,2,3} UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Correspondence Address: 210206115@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to examine education policy analysis through a Systematic Literature Review (SLR) approach using the PRISMA method. Data were collected from articles in Google Scholar using the Publish or Perish 8 application, resulting in 100 articles, which were selected into nine relevant articles. The results indicate that education policy analysis has not been fully optimized in its implementation. Some of the main challenges identified include a lack of resources, weak implementation strategies, unclear policy visions, and mismatches between central policies and local conditions. Policy analysis encompasses the processes of problem identification, data collection, alternative formulation, and policy evaluation.

Keywords : *Analysis, Policy, Education*

Abstrak

Pendidikan merupakan sektor strategis yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kebijakan pendidikan berperan penting dalam menentukan arah, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis kebijakan pendidikan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan metode PRISMA. Data dikumpulkan dari artikel-artikel di Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish 8, menghasilkan 100 artikel yang diseleksi menjadi 9 artikel relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebijakan pendidikan belum sepenuhnya optimal dalam implementasinya. Beberapa tantangan utama yang ditemukan meliputi kurangnya sumber daya, lemahnya strategi implementasi, ketidakjelasan visi kebijakan, dan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Analisis kebijakan mencakup proses identifikasi masalah, pengumpulan data, formulasi alternatif, hingga evaluasi kebijakan.

Kata Kunci : *Analisis, Kebijakan, Pendidikan*

1. Introduction

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, hamper seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, ada unsur politik, ekonomi, hokum, social, budaya, psikologi, kesehatan, agama, sosiologi, dan lain sebagainya. Bagaimanapun penanganan pendidikan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut agar strategi dan kebijakan yang ditempuh benar-benar mengantarkan Indonesia pada tujuan yang dicita-citakan (Madjid, 2018).

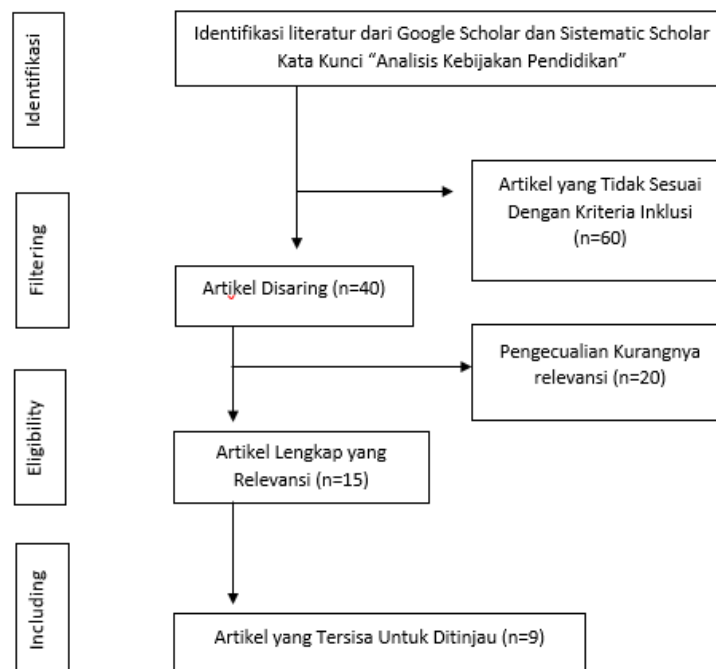
Pendidikan dipengaruhi oleh hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif, berbeda dengan hokum (law) dan peraturan (regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (Aziz et al., 2020).

Istilah kebijakan (policy) sering kali diterjemahkan dengan politik, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan dan rencana strategis lainnya. Beragam pandangan tentang istilah kebijakan, Stephen j. Ball menyatakan policy as a text and discourse yang menarik untuk dikolaborasi. Pakar lainnya menyebutkan kebijakan menjadi bagian dari perencanaan guna mempersiapkan seperangkat keputusan yang berhubungan dengan biaya, personil, jadwal untuk mencapai tujuan (goals) yang dilakukan oleh sejumlah actor yang terdiri dari pimpinan, bawahan, lembaga pemerintah atau swasta dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu (Hamidah, 2020).

Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi data (masalah dibidang pendidikan) untuk merumuskan beberapa alternative kebijakan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan permasalahan pendidikan (Murniarti, 2024). Analisis kebijakan pendidikan tidak hanya harus menguasai teknik pengembangan dan penelitian saja, melainkan juga harus menguasai permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkaitan pada masa kini, baik permasalahan internal pendidikan maupun permasalahan eksternal Pendidikan (Iskandar, 2019).

2. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literature sistematis sesuai dengan pedoman Preferred Reporting Items For Systematic Reviews And Meta-Analyses (PRISMA). Melalui pendekatan tinjauan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan memetakan topik-topik penelitian yang serupa secara bersamaan. Dalam proses systematic literature review (SLR) yang mengadopsi desain PRISMA, terdapat beberapa tahapan penting yang meliputi strategi pemilihan data, kriteria inklusif dan eksklusif penelitian, serta proses ekstraksi data.



Penelitian ini menggunakan metodologi PRISMA untuk memastikan bahwa proses tinjauan literature dilakukan secara sistematis dan transparan, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan direplikasi (Rethlefsen et al., 2021). Adapun tahapan dalam SLR ini melibatkan pengumpulan dan analisis kritis terhadap literature yang relevan, memastikan bahwa setiap langkah dalam pemilihan dan penelaahan studi dilakukan dengan metode yang terstruktur, sehingga SLR ini dapat berkontribusi pada pemetaan yang komprehensif dan mendalam terhadap topik penelitian dalam bidang yang akan dikaji

Data yang diambil dari basis data google scholer untuk menemukan literature yang relevan dengan bantuan publish or perish 8 (Pop8). Proses tinjauan literature

sistematis dilakukan dengan mencari artikel dengan kata kunci “analisis kebijakan pendidikan”. Proses PoP8 menghasilkan 100 artikel awal, kemudian dipilih 9 naskah setelah melewati proses penyaringan judul, abstrak, dan teks lengkap. Seluruh artikel digunakan kemudian diformat ke dalam tabel yang berisi nomor, judul, penulis, tahun dan hasil penelitian. Temuan artikel-artikel tersebut kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan berdasarkan data.

3. Results and Discussions

Peneliti melakukan pencarian artikel pada tanggal 5-9 Juli 2025. Melalui analisis menggunakan metode SLR terhadap artikel-artikel tentang analisis kebijakan pendidikan dari berbagai artikel/jurnal, peneliti berhasil mengidentifikasi 9 Artikel yang relevan dengan konteks penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 1 Artikel yang terbit pada tahun 2020, 1 Artikel pada tahun 2021, 2 artikel pada tahun 2022, 2 artikel pada tahun 2023 dan 3 artikel yang terbit pada tahun 2024 yang akan dianalisis dalam penelitian ini.



Berdasarkan analisis SLR terhadap artikel-artikel yang dipilih, peneliti menemukan bahwa analisis kebijakan pendidikan belum sepenuhnya terimplementasi di lingkup pendidikan. Artikel-artikel yang dianalisis memberikan gambaran terkait hasil pelaksanaan dari analisis kebijakan pendidikan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Dalam memahami analisis kebijakan pendidikan, terlebih dahulu perlu dijelaskan makna dari masing-masing istilah yang membentuknya, yaitu analisis, kebijakan, dan pendidikan. Secara umum, analisis dapat diartikan sebagai proses berpikir sistematis untuk mengurai, memahami, serta menilai suatu permasalahan dengan tujuan menemukan solusi yang tepat. Menurut Nana Sudjana menyatakan bahwa analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya (Sudjana, 2016). Adapun menurut Habibi dan Aprilian menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya (Habibi & Aprilian, 2020). Analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.

Sementara itu, kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh individu atau lembaga berwenang guna mengatur suatu urusan publik dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan adalah prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan organisasi. Kebijakan membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dengan mendukung hubungan yang berarti antara tujuan bisnis di satu sisi dan fungsi organisasi, faktor fisik, dan personil di sisi lain (Kristian, 2023). Kebijakan yang baik harus ditulis agar dapat dilihat dan dipahami oleh semua orang. Dalam konteks pendidikan, kebijakan mengatur berbagai aspek penting seperti kurikulum, pembiayaan, pemerataan akses, hingga kualitas guru.

Selanjutnya, pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi individu melalui pembelajaran yang terencana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Pendidikan tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter, nilai, dan keterampilan hidup.

Berdasarkan pemahaman tersebut, analisis kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai proses sistematis dalam mengkaji dan menilai kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam bidang pendidikan, baik dari aspek perencanaan, implementasi, maupun dampaknya terhadap peserta didik dan masyarakat. Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menciptakan, menilai, dan memilih alternatif kebijakan yang paling rasional

guna menyelesaikan masalah public (Dunn, 2003). Dalam pendidikan, hal ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan kurikulum, pendanaan, sistem zonasi, digitalisasi pembelajaran, dan lain sebagainya.

Tujuan analisis kebijakan pendidikan

Tujuan utama dari analisis kebijakan pendidikan dalam artikel ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh kebijakan yang telah diterapkan dalam sektor pendidikan, mulai dari proses perumusannya hingga implementasi di lapangan. Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dirancang, aktor-aktor yang terlibat, serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas apakah kebijakan tersebut telah dirancang dan dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan awal.

Selanjutnya, analisis ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan pendidikan dengan kondisi kontekstual yang dihadapi, baik secara lokal maupun nasional. Hal ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan global yang mempengaruhi kebutuhan pendidikan di masyarakat. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi sejauh mana kebijakan pendidikan mampu menjawab tantangan yang ada dan mengakomodasi kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan lainnya (Nurmayuli et al., 2024).

Tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan pendidikan terhadap kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan efisiensi sistem pendidikan. Dengan menilai hasil dari implementasi kebijakan, analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif tentang efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari sini pula dapat ditemukan celah atau permasalahan yang perlu segera diperbaiki dalam rangka pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang (Adnan et al., 2020).

Hantono dkk, menyoroti bahwa analisis kebijakan pendidikan berfungsi untuk memahami dinamika perumusan dan pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan. Dengan memahami aktor, proses, dan mekanisme implementasi, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas sistem Pendidikan (Hantono et al., 2024).

Proses analisis kebijakan pendidikan

Proses analisis kebijakan pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi informasi serta data pendidikan guna menghasilkan alternatif kebijakan yang tepat dalam memecahkan masalah pendidikan. Proses ini dilakukan agar kebijakan yang

diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tujuan pendidikan nasional, serta mampu menjawab tantangan zaman. Secara umum, proses analisis kebijakan pendidikan terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu:

1. Identifikasi masalah (Inisiasi)

Langkah awal dalam analisis kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada dalam dunia pendidikan. Masalah bisa berupa rendahnya mutu pendidikan, ketimpangan akses pendidikan, kurangnya efektivitas kebijakan, atau lemahnya pelaksanaan program. Masalah harus dirumuskan secara jelas agar analisis dapat difokuskan pada solusi yang tepat sasaran (Oktavia et al., 2021).

2. Pengumpulan dan analisis data

Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dapat bersumber dari dokumen kebijakan, hasil penelitian, laporan lembaga pendidikan, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi lapangan. Data ini kemudian dianalisis untuk memahami akar penyebab masalah dan dampak dari kebijakan yang sedang berjalan.

3. Perumusan alternatif kebijakan

Berdasarkan analisis data, beberapa alternatif solusi atau kebijakan dirumuskan. Alternatif ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan normatif agar dapat membantu pengambil keputusan dalam memilih kebijakan yang paling efektif.

4. Penyampaian rekomendasi

Alternatif kebijakan yang telah dirumuskan kemudian disampaikan kepada para pembuat keputusan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pendidikan.

5. Implementasi dan evaluasi

Setelah kebijakan ditetapkan, tahap implementasi dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Manfaat analisis kebijakan pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan memiliki sejumlah manfaat strategis. Pertama, analisis ini memberikan kerangka sistematis dan terstruktur dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Kedua, analisis kebijakan menjadi dasar

pengambilan keputusan berbasis data dan bukti, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga empiris dan aplikatif (Marsari et al., 2024). Ketiga, proses ini mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi, khususnya melalui tahapan sosialisasi dan evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan (Lumban Gaol, 2022). Keempat, melalui piloting dan diseminasi, kebijakan yang dianalisis memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan konteks lokal dan kondisi sosial pendidikan yang beragam (Daud, 2025). Kelima, analisis kebijakan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, karena proses evaluasi memberikan ruang untuk memperbaiki kekurangan sebelum diterapkan secara menyeluruh (Abd. Muiz et al., 2024).

Peran kebijakan pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengarahkan dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Melalui proses analisis yang sistematis dan berbasis bukti, pembuat kebijakan dapat memahami secara mendalam berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan, mulai dari ketimpangan akses, kualitas tenaga pendidik, hingga relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Peran utama analisis kebijakan adalah sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang objektif dan rasional, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Analisis kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas dan relevansi sistem pendidikan. Putra dan Nugroho mengatakan analisis kebijakan berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih objektif dan tepat sasaran. Selain itu, Gaol menekankan bahwa proses analisis kebijakan membantu mengidentifikasi permasalahan mendasar dalam pendidikan, seperti ketimpangan akses dan kualitas sumber daya manusia, sehingga memungkinkan perumusan strategi yang sesuai dengan konteks local (Lumban Gaol, 2022). Analisis kebijakan juga berperan sebagai mekanisme evaluasi yang sistematis, yang memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk merefleksikan dampak kebijakan dan melakukan perbaikan berkelanjutan (Aziz et al., 2020). Lebih jauh, analisis ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi proses pembuatan kebijakan. Di tengah dinamika perubahan sosial dan teknologi, analisis kebijakan pendidikan menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan reformasi yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan (Oktavia et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan kapasitas analisis kebijakan menjadi prioritas utama dalam upaya

membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut kekuatan kodrat atau fotrak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Rifka & Quddus, 2024).

Dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” merupakan salah satu tujuan pendidikan diindonesia yang kemudian dijabarkan pada alinea ke 4 pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa adanya perbedaan. Pendidikan merupakan sarana bagi setiap individu agar memperoleh kehidupan yang layak (Lailatussaadah et al., 2024; Ntimuk et al., 2022).

Adapun yang dimaksud dengan implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahap pelaksanaan kebijakan pendidikan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dijalankan yang mana tahapan implementasi kebijakan pendidikan ini melibatkan berbagai langkah dan proses seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Seperti halnya kebijakan publik yang terdiri dari perencanaan agenda, merumuskan kebijakan, pengadopsian kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan. Dua analisis kebijakan ini saling berketerkaitan dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan Pendidikan (Dwi et al., 2024).

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik mengarah kepada penerapan apa yang ingin maupun yang tidak ingin pemerintah jalankan. Sehingga dapat dikatakan kebijakan publik adalah suatu bentuk intervensi dari segala solusi untuk memecahkan masalah-masalah publik (Thalib & Haris, 2023).

Diperlukan model perumusan kebijakan pendidikan yang tepat untuk segala tindakan dan kebutuhan. William N. Dunn mengemukakan bahwa model perumusan kebijakan dibagi menjadi 9 model, yakni model deskriptif, model normative, model verbal, model teori elit, model teori rasionalisme, model inkrementalis, model pengamatan, model demokratis dan model strategis. Setiap model memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, perumusan kebijakan ini harus melihat dan memahami situasi dan kondisi yang berbeda (Mulyadi et al., 2024).

No	Judul Artikel	Penulis dan Tahun Publikasi	Metode	Hasil penelitian
1.	“Analisis kebijakan pendidikan karakter: Relevansi pendidikan karakter dalam islam dengan pendidikan karakter Pancasila”	(Rifka & Abdul Quddus, 2024)	Tinjauan pustaka	Hasil penelitian dari artikel ini yaitu menyatakan bahwa kebijakan menteri pendidikan tentang kebijakan pendidikan karakter yang berlandaskan pada Pancasila belum dilaksanakan dengan maksimal dan belum mencapai tujuan dari pendidikan karakter karena masih ditemukan ciri manusia Indonesia adalah lemah karakternya. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa pendidikan karakter juga belum memiliki visi misi yang jelas dan tidak berlandasakn pada tauhid yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam Pancasila.
2.	“Model perumusan kebijakan pendidikan”	(Mulyadi et al., 2024)	Analisis Literatur, Library Research)	Penelitian ini mengatakan bahwa setiap model analisis kebijakan pendidikan pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, tinggal melihat situasi dan kondidsi pada saat perumusan kebijakan, model mana yang cocok digunakan dalam situasi tersebut. Peneliti memaparkan beberapa pemilihan model analisis kebijakan pendidikan diantaranya yakni urgensi berkaitan dengan kepentingan agar kebijakan tersebut harus cepat disahkan, kemudian

				berkaitan dengan penggunaan kebijakan dalam jangka waktu yang lama yang mengharuskan fokus perumusan kebijakan dapat digunakan pada situasi berkesinambungan, dan yang terakhir berkaitan dengan biaya dan keefisienan waktu.
3.	“peran analisis kebijakan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan manajemen pendidikan”	Hantono et al, 2024	Kualitatif, deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat berperan penting dalam mengelola pendidikan secara efektif. Manajemen pendidikan sering menghadapi tantangan seperti perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan yang terus berubah. Analisis kebijakan membantu para pemangku kepentingan memahami masalah dan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Dengan informasi tersebut, mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Kemudian, pengambilan keputusan berbasis bukti digunakan untuk memilih solusi terbaik, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan melaksanakan kebijakan secara efektif. Secara keseluruhan, analisis dan keputusan yang tepat dapat meningkatkan kinerja sistem pendidikan dan memberikan

				manfaat nyata bagi siswa, guru, dan masyarakat.
4.	"Implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan public"	(Alber Tanjung et al., 2023)	Literatur Riview	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untu mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
5.	"Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Merauke (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)"	(Najdah Thalib & umiyati Haris 2023)	Kualitatif dan Literatur Riview	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di kabupaten merauke kurang efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya sumber daya yang diserahkan., strategi aktor yang masih kurang serta kepatuhan dan daya tangkap implementor yang masih kurang.
6.	"policy process in the context of education: a content analysis"	Nasib Tua Lumban Gaol, 2022	Kualitatif, analisis konten.	Hasil studi ini mengidentifikasi enam tahapan di dalam siklus kebijakan pendidikan, yaitu penentuan agenda, fomulasi, legitimasi, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi. Siklus kebijakan pendidikan ini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pengetahuan para pembuat kebijakan,

				pemangku kepentingan, peneliti, dan pengimplementasi kebijakan tentang proses kebijakan pendidikan. Selain itu, siklus tersebut dapat digunakan sebagai panduan dan tuntunan untuk mengelola sektor pendidikan, terkhusus pembuatan berbagai kebijakan di level makro (pusat/kementerian), meso (provinsi/kabupaten/kota), dan lokal (institusi pendidikan). Selanjutnya, hal tersebut juga dapat membantu para praktisi pendidikan berpikir secara sistematis dan tepat dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan.
7.	"Analisis Kebijakan Profil Pelajar Pancasila dalam Dunia Pendidikan"	(Petronela Ntimuk et al., 2022)	Kualitatif dan Studi literatur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perintah dalam menerapkan profil Pancasila dalam dunia pendidikan merupakan dasar dan asas yang dapat mengiringi arah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang diterapkan dapat mengatur alurnya arah pendidikan Indonesia melalui proses yang dilakukan dalam pendidikan itu sendiri.
8.	"kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi"	Linda Sari Oktavia et al, 2021	studi kepustakaan	Hasil penelitian ini menjelaskan Dalam mengembangkan kebijakan pendidikan diperlukan kerangka pengembangan

				diantaranya yaitu informasi kebijakan, metode perolehan informasi, argumentasi kebijakan dan bentuk analisis kebijakan. Selain itu ada enam tahapan analisis kebijakan pendidikan yang terdiri dari inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi. Untuk menerapkan sebuah kebijakan pendidikan maka diperlukan tahapan sosialisasi, tahapan piloting, dan tahapan desiminasi.
9.	model analisis kebijakan pendidikan	Asep abdul aziz, 2020	Kualitatif, studi pustaka	Hasil penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan pendidikan terdiri dari tiga hal yaitu model formulasi, model analisis, dan model implementasi. Model formulasi terdiri dari model kelembagaan, model sistem, model investigasi campuran, model proses, model teori elit, model rasional, model kritis, model strategis, model deliberatif. Sementara itu, model analisis kebijakan pendidikan terdiri dari model prospektif, retrospektif, dan integratif. Model implementasi terdiri dari model top-down dan bottom-up. Hasil analisis kebijakan pendidikan yang digunakan di Indonesia lebih banyak menggunakan model analisis kebijakan politik yang

				didasarkan pada asumsi politik.
--	--	--	--	---------------------------------

4. Conclusion

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap sembilan artikel yang membahas analisis kebijakan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan di Indonesia. Analisis ini membantu memahami permasalahan pendidikan secara menyeluruh, merumuskan alternatif kebijakan yang tepat, serta mengevaluasi dampak kebijakan terhadap peserta didik dan masyarakat. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kebijakan pendidikan sudah banyak diterapkan, implementasinya di lapangan belum optimal. Beberapa tantangan yang ditemukan mencakup lemahnya karakter peserta didik, kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, serta kurang jelasnya visi dan misi kebijakan itu sendiri. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan konteks lokal maupun kebutuhan masyarakat.

Analisis kebijakan pendidikan, sebagai proses ilmiah dan sistematis, mencakup tahap-tahap penting mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, perumusan alternatif kebijakan, hingga evaluasi implementasi. Model-model analisis kebijakan seperti model rasional, strategis, dan inkremental memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihannya harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan kebijakan yang dirancang. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dalam analisis kebijakan pendidikan agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan kebijakan yang adaptif serta berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, budaya, dan teknologi, analisis kebijakan pendidikan merupakan alat penting untuk mendorong reformasi pendidikan yang relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

REFERENCES

- Abd. Muiz, Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 46–64. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.272>
- Adnan, G., Lailatussaadah, L., Bin Jamil, A. I., Jannah, M., Muslim, B., & Erfiati, E. (2020). The Problems and Alternative Solutions for the Implementation of Entrepreneurship Education in the Higher Education: A Literature Review. *Tadris*:

- Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 349-361.
<https://doi.org/10.24042/tadris.v5i2.7264>
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyantri, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(1), 11-26.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Daud, Y. M. (2025). Analisis Bibliometrik: Peran Humas Perguruan Tinggi. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 14(01), 20-35.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Kebijakan Publik*. Gajah Mada University.
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094-7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>
- Habibi, & Aprilian. (2020). *Tutorial dan penjelasan aplikasi e-office berbasis web menggunakan metode RAD*. Kreatif Industri Nusantara. Kreatif Industri Nusantara.
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44.
- Hantono, H., Pangaribuan, W., Mudjisusatyo, Y., & Zainuddin, Z. (2024). Peran Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 590-600. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3811>
- Iskandar, W. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah : Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1-22.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Lailatussaadah, Nurmayuli, & Ariska, D. (2024). Kolaborasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 13(2), 34-50.
<https://www.academia.edu/download/90222395/5445.pdf>
- Lumban Gaol, N. T. (2022). Policy Process in the Context of Education: a Content Analysis. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 1-13.
<https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.44281>
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 89-94.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3441>
- Mulyadi, Kholifah, E. R., Suryadi, Sutriyanti, & Hermanto. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (EISSN:)*, 7(2), 1399-1404.
- Murniarti, E. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Widina Media Utama.

- Ntimuk, P., Hadi, M. Y., & Arifin, I. (2022). Analisis Kebijakan Profil Pelajar Pancasila Dalam Dunia Pendidikan. *Seminar Nasional Manajemen Strategik Pengembangan Profil Pelajar Pancasila Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Dasar (DIKDAS)*, 5, 1-10.
- Nurmayuli, Lailatussaadah, & Mustika, C. R. (2024). Analisis Pemetaan Penempatan Guru Sekolah Dasar Se-Kota Lhokseumawe. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 313-326.
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>
- Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., Koffel, J. B., & Group, P. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10(39), 1-19.
- Rifka, R., & Quddus, A. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter: Relevansi Pendidikan Karakter dalam Islam dengan Pendidikan Karakter Pancasila. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1202-1207. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3531>
- Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Remaja Roesdakarya.
- Thalib, N., & Haris, U. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Merauke (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(1), 76-84.